

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia, hal ini sesuai dengan kondisi wilayah Republik Indonesia sebagai negara agraris. Sektor pertanian memberikan kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai penopang perekonomian masyarakat maka sektor pertanian berbasis di pedesaan, maka masyarakat pada umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan sebagai petani dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam melaksanakan aktivitas usahanya di bidang pertanian.

Beberapa permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha pertaniannya di antaranya adalah keterbatasan teknologi pertanian yang modern. Para petani masih menggunakan teknologi sederhana atau manual dalam mengolah lahan pertanian, sedangkan tuntutan produktivitas hasil-hasil pertanian adalah tersedianya teknologi pertanian modern. Teknologi ini merupakan perangkat alat pertanian yang tepat dalam sasaran dan berguna dari segi pemanfaatan, atau dikenal dengan istilah teknologi tepat guna (Mardikanto, 2003: 51).

Suatu teknologi dapat dikatakan tepat guna apabila secara teknis mudah dilakukan, secara finansial (ekonomi) menguntungkan, secara sosial budaya diterima masyarakat; dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan dalam bidang pertanian tidak akan berkembang tanpa ada perubahan dalam bidang teknologi, karena teknologi merupakan input dalam usahatani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan serta taraf hidup petani. Tingkat pendapatan dan produksi yang dicapai petani tergantung sejauhmana tingkat penerapan teknologi yang dianjurkan telah dipraktikkan oleh mereka di lapangan, dengan demikian keberhasilan petani pada akhirnya dapat dilihat dari tingkat penerapan teknologi baru yang telah dicapai petani (Mardikanto, 2003: 52).

Permasalahan lain yang dihadapi petani adalah sistem bercocok tanam yang belum optimal, pada umumnya petani masih menerapkan pola pertanian tradisional yang turun temurun diwariskan oleh orang-orang tua atau tradisi masyarakat. Padahal dengan pola pertanian yang modern dapat meningkatkan produktivitas usaha tani yang terus menerus dan berkelanjutan. Adanya pola pertanian yang modern maka diharapkan produksi dapat meningkat baik dalam jumlah maupun mutunya. Selain itu masalah yang juga dihadapi para petani adalah keterbatasan dana atau modal dalam melaksanakan usaha pertanian, sehingga membuka kesempatan bagi para rentenir untuk meminjamkan modal usaha kepada para petani dengan bunga yang tinggi dan merugikan petani.

Berbagai permasalahan tersebut merupakan hal yang dialami oleh para petani dan harus segera dicarikan solusi terbaiknya, mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang tangguh dalam perekonomian nasional. Tangguhnya sektor pertanian

antara lain disebabkan karena (1) Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam ketersediaan sumberdaya alam yang menjadi penyangga utama kegiatan sektor pertanian, (2) secara institusiaonal sektor pertanian yang relatif tradisional terlindung dari pengaruh eksternal yang merugikan karena keterbatasan kaitan (*linkage*) sektor tersebut dengan sektor manufaktur yang berorientasi keluar, (3) sektor pertanian terdiri dari banyak rumah tangga tani, perusahaan kecil menengah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan internal, dan (4) sumberdaya alam Indonesia sangat beragam diantara wilayah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan antar wilayah yang ekstensif (Irawan Sukamto, 2004: 14-15).

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pembangunan sektor pertanian dan membantu para petani untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan yang ada tersebut adalah dengan melaksanakan Program Mulang Tiyuh (Pulang Kampung Membangun Desa). Program Mulang Tiyuh (pulang kampung) merupakan salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, yang pada intinya mengajak kepada para tokoh dan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Way Kanan untuk pulang kampung dalam rangka membangun membangun daerah.

Maksud Program Mulang Tiyuh adalah agar masyarakat yang lahir di Waykanan tidak hanya menumpang lahir, namun juga ikut membangun daerah. Program ini diresmikan oleh Menko Kesra HR Agung Laksono di Kampung Bratayudha, Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan pada hari Sabtu 22 Januari 2011 yang lalu. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Wakil Gubernur

Provinsi Lampung Joko Umar Said, Bupati dan Wakil Bupati Waykanan Bustami Zainudin dan Raden Nasution Husin.

Bupati Kabupaten Waykanan Bustami Zainudin mengatakan Mulang tiyuh dilakukan untuk pengembangan Waykanan, oleh karena itu Bupati mengajak putra-putri Waykanan yang merantau untuk berpartisipasi membangun daerahnya, sebab membangun Waykanan tidak hanya cukup dengan bupati dan wakil bupati, tetapi putra-putri Waykanan yang berada di perantauan berpartisipasi membangun daerahnya, khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Way Kanan, yaitu “Way Kanan Bumi Petani” (Bustami Zainudin, 2011: 3).

Program Mulang Tiyuh tersebut pada dasarnya sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat di pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian. Program ini merupakan hal yang sangat positif, sebab sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara dari sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor ini masih terus harus dikembangkan guna mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur sejahtera. Melalui Program Mulang Tiyuh diharapkan akan terjadi transformasi pertanian dengan mengembangkan teknologi pertanian sebagai langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan petani melalui program Mulang Tiyuh didasarkan pada semangat penanggulangan kemiskinan yang umumnya terjadi di wilayah pedesaan. Kemiskinan menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini, dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Selain itu juga, kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk di dalamnya pendidikan dan informasi, bisa dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan.

Kewajiban pengentasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, sehingga diharapkan adanya komitmen bersama dari segenap komponen (*stakeholder*) untuk melakukan gerakan mengatasi kemiskinan, demikian pula halnya dengan putra putri Kabupaten Way Kanan yang telah berhasil secara sosial dan ekonomi di luar kabupaten untuk pulang kampung (*mulang tiyuh*) ke Kabupaten Way Kanan dan ikut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari

kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Ife dalam Suharto, 2005: 58).

Pemberdayaan sebagai tujuan, menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses, demikian pula halnya dengan proses pemberdayaan petani sebagai bagian dari masyarakat miskin di pedesaan, yang akan dicapai melalui program mulang tiyuh oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Program Mulang Tiyuh ini sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Bustami Zainudin, 2011: 5), yaitu sebagai berikut:

1. Mengkonsentrasikan wilayah pengembangan komoditas unggulan (didasarkan pada kesesuaian agreokologi, wilayah dan penggunaan lahan)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kemampuan bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis, sehingga SDM mendapat peningkatan agroteknik dan wawasan agribisnis.
3. Melakukan pengembangan produk dari komoditas unggulan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan

4. Melakukan pemantapan peran kelembagaan pendukung (penguatan litbang, lembaga pengkreditan, kelompok tani, koperasi dan lain-lain)
5. Membangun prasarana penyediaan sarana yang memadai dibutuhkan untuk pengembangan system dan usaha agribisnis.
6. Mewujudkan kemudahan pelayanan pada masyarakat
7. Membangun semangat kemandirian masyarakat dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan

Dasar hukum mengenai Program Mulang Tiyuh ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 huruf h dinyatakan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dan dalam rangka itu, kepada daerah otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum operasionalnya adalah Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.25/III.10-WK/HK/2011 Tentang Kegiatan Harian Mulang Tiyuh Bupati Way Kanan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduk Kampung Simpang Asam bekerja sebagai petani, dari total 951 Kepala Keluarga (KK), terdapat 919 KK atau 96,64% bekerja

sebagai petani, sementara itu sisanya 16 KK atau 1,68% bekerja sebagai pedagang dan 16 KK atau 1,68% bekerja sebagai PNS.

2. Para petani di Kampung Simpang Asam dihadapkan pada berbagai masalah dalam melaksanakan usaha pertanian, di antaranya sebagai berikut:
 - a) Peralatan pertanian yang digunakan di Kampung Simpang Asam masih bersifat tradisional, seperti pemanfaat tenaga kerbau untuk membajak sawah, pemupukan tanaman yang masih menggunakan pupuk hewani
 - b) Saluran irigasi yang belum baik dan masih besarnya areal persawahan tadah hujan, sehingga panen hanya 1 tahun sekali.
 - c) Pemanfaatan lahan pertanian yang kurang optimal sehingga produktivitas lahan untuk memproduksi hasil-hasil pertanian rendah
 - d) Modal usaha di bidang pertanian yang masih kecil, belum adanya Koperasi Petani.

(Sumber: Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2011)

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Program Mulang Tiyuh dalam rangka pemberdayaan petani di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Program Mulang Tiyuh dalam rangka pemberdayaan petani di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Mulang Tiyuh dalam rangka pemberdayaan petani di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya kajian mengenai efektivitas pelaksanaan program mulang tiyuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan petani.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mengembangkan program dan kebijakan lokal dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya di era otonomi daerah.